

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**



**TRIWULAN III
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BAB I KUESIONER SURVEI	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Dan Sasaran.....	2
C. Kuesioner Survei.....	2
BAB II METODOLOGI SURVEI	6
A. Kriteria Responden.....	6
B. Metode Pencacahan.....	8
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis.....	10
BAB III PENGOLAHAN SURVEI	13
A. Analisis Hasil Survei.....	13
B. Tindak Lanjut 3 (tiga) Unsur Terendah Hasil Survei.....	20
BAB IV DATA SURVEI	21
A. Hasil Survei Dari Aplikasi SISUPER.....	22
B. Publikasi Hasil Survei.....	22
C. Data Responden.....	23
BAB V PENUTUP	29
A. Kesimpulan.....	29
B. Rekomendasi.....	29
LAMPIRAN	30

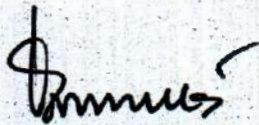
LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Berdasarkan Permen PAN & RB 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah

Jakarta, 02 Oktober 2023

Ketua Tim Survei



Berlin Damanik, S.H.,M.Hum

Mengetahui

Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta



Dr. H. Herri Swantoro, S.H.,M.H

BAB I

KUESIONER SURVEI

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementrian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disususnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Sebagai salah satu syarat untuk tercapainya akreditasi penjaminan mutu sebagai pengadilan yang berkualitas (ICPE) yaitu dengan mengadakan Prespsi Anti Korupsi sebagai pedomannya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tanggal 8 Juli 2021 memberlakukan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya dan Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 Mei 2021. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di Lingkungannya .

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggaraan pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Tujuan Dan Sasaran

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Kuesioner Survei

Dalam pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kepada pengguna layanan, kuesioner yang disusun mengacu pada pedoman dari Kementerian PAN-RB. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? | Tidak Sesuai Prosedur |
| | Jarang Sesuai Prosedur |
| | Sering Sesuai Prosedur |

	Selalu Sesuai Prosedur
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	<p>Petugas melayani selalu meminta imbalan</p> <p>Petugas melayani sering meminta imbalan</p> <p>Petugas melayani jarang meminta imbalan</p> <p>Petugas melayani tanpa meminta imbalan</p>
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	<p>Selalu</p> <p>Sering</p> <p>Jarang</p> <p>Tidak Ada</p>
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	<p>Tidak Pernah</p> <p>Jarang</p> <p>Sering</p> <p>Selalu</p>

<p>5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?</p>	<p>Tidak Pernah</p> <p>Jarang</p> <p>Sering</p> <p>Selalu</p>
<p>6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?</p>	<p>Selalu</p> <p>Sering</p> <p>Jarang</p> <p>Tidak Ada</p>
<p>7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)</p>	<p>Tidak Pernah</p> <p>Jarang</p> <p>Sering</p> <p>Selalu</p>
<p>8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?</p>	<p>Selalu</p> <p>Sering</p> <p>Jarang</p>

	Tidak Ada
9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	Selalu
	Sering
	Jarang
	Tidak Ada
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?	Selalu
	Sering
	Jarang
	Tidak Ada

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan terhadap responden/masyarakat yang mendapatkan manfaat layanan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, baik yang datang ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maupun secara online dengan menggunakan aplikasi SI SUPER, yang dapat diakses pada website Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta memiliki Kriteria Pendidikan Minimal SLTA dan Kriteria Pekerjaan sebagai Berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Advokat
3. Wiraswasta
4. Pegawai Swasta
5. TNI/POLRI
6. Pelajar/Mahasiswa

Para responden yang telah mengisi Survei Persepsi Anti Korupsi melalui aplikasi siSuper pada link <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/> dapat dipetakan dengan karakteristik sebagai berikut:

A.1. Tingkat pendidikan responden

Menurut tabel profil responden tersebut dibawah ini pendidikan terakhir, mayoritas adalah S1 sejumlah 48 orang atau 82,8% dari total responden. Sementara responden dengan pendidikan terakhir Diploma menduduki urutan terkecil yaitu sejumlah 3 orang atau 5,1% dari total responden.

Tabel 1
Tingkat pendidikan responden

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	SLTA/SMK	3	5.1	5.1
	Diploma	0	0	5.1
	S1	48	82.8	87.8
	S2/S3	7	12.1	100
	Total	58	100	100
Total		58	100	

A.2. Pekerjaan responden

Berdasarkan tabel profil pekerjaan responden tersebut dibawah ini, mayoritas adalah para Pegawai Swasta sejumlah 26 orang atau 44,9% dari total responden. Sementara responden yang berasal dari TNI/POLRI menduduki urutan terkecil yaitu sejumlah 1 orang atau 1,8% dari total responden.

Tabel 2
Jenis pekerjaan responden

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	PNS	6	10.3	10.3
	Pegawai Swasta	26	44.9	55.2
	Wirausaha	3	5.1	60.3
	TNI/POLRI	1	1.8	62.1
	Pelajar/mahasiswa	3	5.1	67.2
	Advokat/Pengacara	19	32.8	100
	Total	58	100	100
Total		58	100	

A.3. Kelompok Jenis Kelamin

Menurut tabel profil responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel dibawah ini, mayoritas responden adalah laki-laki sejumlah 46 orang atau 79,3% dari total responden. Sementara responden berjenis kelamin perempuan

menduduki urutan terendah yaitu sejumlah 12 orang atau 20,7% dari total responden.

Tabel 3
Jenis Kelamin responden

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	laki-laki	46	79.3	79.3
	Perempuan	12	20.7	100
	Total	58	100	100
Total		58	100	

B. Metode Pencacahan

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B.1. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam survei ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

B.2. Lokasi Survei Dan Unit Analisis

Lokasi survei adalah tempat dimana petugas melakukan survei terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data survei yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

B.3. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam survei ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka dan berupa pilihan ganda (*multiple choice*) melalui Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) dengan menu pengisian data responden, pengisian layanan yang dibutuhkan responden, pengisian kuesioner serta pengisian saran dan masukan sebagaimana terlampir (Lampiran I).

Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 bulan atau data minimal 50 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Analisis data untuk menentukan *indeks Persepsi Anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

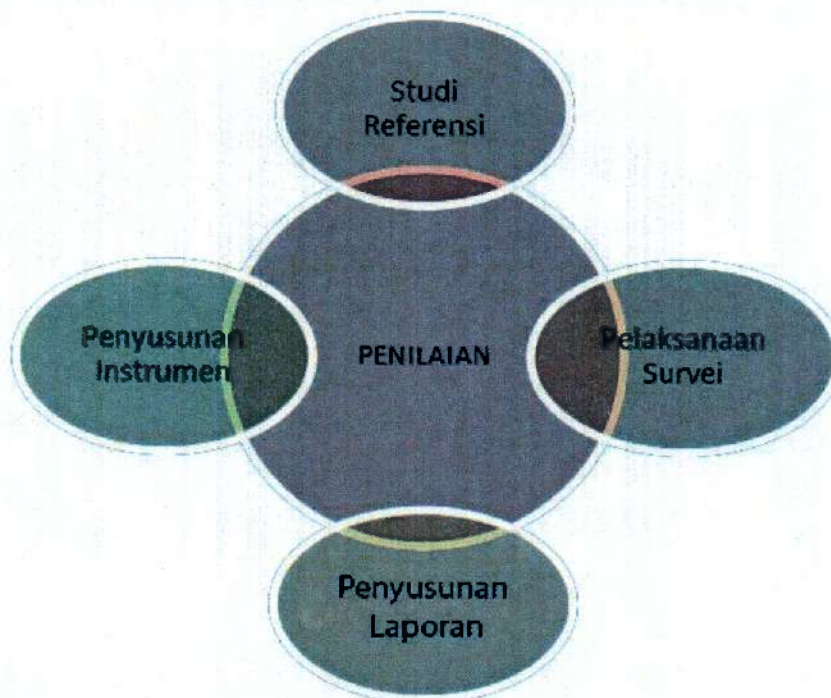
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

C.1. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1
Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 4
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 5
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

A.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,913. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat bersih dari manipulasi peraturan semakin besar indeks yang didapat mengindikasikan bahwa pelayanan sesuai dengan prosedur dan mudah.

Tabel 6

Niali Indeks Pada Indikator : Manipulasi Peraturan

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Tidak sesuai prosedur	1	0	0
2.	Jarang sesuai prosedur	2	0	0
3.	Sering sesuai prosedur	3	5	15
4.	Selalu Sesuai prosedur	4	53	212
			58	227
Indeks				3,913

A.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,948. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari penyalahgunaan jabatan. Semakin besar nilai indeksnya maka mengindikasikan bahwa semakin bersih pula Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam melakukan penyalahgunaan jabatan.

Tabel 7
Nilai Indeks Pada Indikator: Penyalahgunaan Jabatan

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Petugas melayani meminta imbalan	1	0	0
2.	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	0	0
3.	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	3	9
4.	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	55	220
			58	229
Indeks				3,948

A.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,931. Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari menjual pengaruh.

Tabel 8
Nilai Indeks Pada Indikator: Menjual Pengaruh

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Selalu dihubungi	1	0	0
2.	Sering dihubungi	2	0	0
3.	Jarang/pernah dihubungi	3	4	12
4.	Tidak pernah dihubungi	4	54	216
			58	228
Indeks				3,931

A.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transparansi biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,948. Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah transparan dalam menginfokan biaya yang ada.

Tabel 9
Nilai Indeks Pada Indikator: Transparansi Biaya

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Tidak mudah	1	0	0
2.	Jarang mudah	2	0	0
3.	Sering mudah	3	3	9
4.	Selalu mudah	4	55	220
			58	229
Indeks				3,948

A.5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,966. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari adanya transaksi rahasia.

Tabel 10
Nilai Indeks Pada Indikator: Transaksi Rahasia

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	2	6
4.	Tidak Pernah	4	56	224
			58	230
Indeks				3,966

A.6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,966, sehingga dapat dijelaskan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah sesuai dan tidak melakukan penambahan biaya terhadap layanan apapun di luar tarif yang sudah ditetapkan .

Tabel 11
Nilai Indeks Pada Indikator : Tambahan Biaya

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	2	6
4.	Tidak Pernah	4	56	224
			58	230
Indeks				3,966

A.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,966, sehingga dapat diartikan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari adanya aktivitas pemberian hadiah.

Tabel 12
Nilai Indeks Pada Indikator: Hadiah

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	2	6
4.	Tidak Pernah	4	56	224
			58	230
Indeks				3,966

A.8. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transparansi pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 3,897, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pembayaran di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah transparan.

Tabel 13
Nilai Indeks Pada Indikator: Transparansi Pembayaran

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	6	18
4.	Tidak Pernah	4	52	208
			58	226
Indeks				9,897

A.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,914 sehingga dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari tindakan percaloan.

Tabel 14
Nilai Indeks Pada Indikator: Percaloan

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Tidak Pernah	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	5	15
4.	Selalu	4	53	212
			58	227
Indeks				3,914

A.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,931 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari perbuatan curang.

Tabel 15
Nilai Indeks Pada Indikator : Perbuatan Curang

No.	Penilaian	Bobot	Frekuensi	Indeks
1.	Tidak Pernah	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	4	12
4.	Selalu	4	54	216
			58	228
Indeks				3,931

Tabel 16
Indeks Persepsi AntiKorupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Peraturan	3,914
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	3,948
Q 3	Menjual Pengaruh	3,931
Q 4	Transparansi Biaya	3,948
Q 5	Transaksi Rahasia	3,966
Q 6	Biaya Tambahan	3,966
Q 7	Hadiah	3,966
Q 8	Tranparansi Pembayaran	3,897
Q 9	Percaloan	3,914
Q 10	Perbuatan Curang	3,931
NNR Per RL		39,379

Dari 10 indeks indikator di atas, maka diperoleh hasil **Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebesar 39,379**. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi anti korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah bersih dari korupsi.

Indeks tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81.26 – 100.00.

Tabel 17
Mutu Pelayanan

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA PERADILAN UMUM TRIWULAN III TAHUN 2023	
NILAI IPK <div style="font-size: 48pt; font-weight: bold;">3,94</div>	RESPONDEN JUMLAH : 58 JENIS KELAMIN : L = 58 / P = 46 PENDIDIKAN : SD = 0 SMP = 0 SMA = 3 DIPLOMA = 0 S1 = 48 S2/S3 = 7 Periode survei = 01 Juli 2023 s/d 30 September 2023
NILAI INTERVAL KONVERSI <div style="font-size: 48pt; font-weight: bold;">98,45</div>	
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	

Tabel 18
Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 –100.00	4	Bersih dari korupsi

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 19
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
1	Tetap mempertahankan apa yang sudah diberikan dengan baik
2	Sangat baik harus dipertahankan
3	Agar di tingkatkan pelayanan yang ada
4	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada

B. Tindak Lanjut 3 (tiga) Unsur Terendah Hasil Survei

Pelaksanaan hasil survei yang dilakukan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada triwulan III tahun 2023 berada pada kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”**. Semua unsur penilaian telah diapresiasi secara baik oleh masyarakat, berdasarkan urutan besarnya Survei Persepsi Anti Korupsi, didapatkan 3 unsur yang mendapatkan nilai terendah, yaitu:

1. Percaloan;
2. Manipulasi Peraturan;
3. Perbuatan Curang (Praktek KKN);

Dalam menindaklanjuti 3 (tiga) unsur terendah tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Percaloan

Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memerintahkan agar penerimaan tamu dapat dilakukan secara virtual guna menghindari kontak langsung dengan pihak luar dan dapat mencegah terjadinya Praktek Percaloan pada pelayanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

2. Manipulasi Peraturan

segala bentuk pelayanan yang ada disesuaikan dengan SOP yang ada, dan sebagaimana yang telah disampaikan disetiap briefing pagi untuk petugas PTSP dari Pengawas maupun Penanggung jawab selalu memberikan arahan bahwa pelayanan harus sesuai dengan SOP dan Peraturan yang berlaku adapun pengadilan Tinggi DKI Jakarta memiliki WA khusus Informasi maupun WA khusus Pengaduan yang Bertujuan untuk memudahkan para Pencari Keadalian dalam menanyakan informasi maupun menyampaikan sebuah Laporan.

3. Perbuatan Curang (Praktek KKN)

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan kini tengah Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) hal tersebut juga di bersamain dengan perubahan pada pola kinerja yang baik sehingga jauh dari Perbuatan Curang (Praktek KKN)

BAB IV DATA SURVEI

A. Hasil Survei Dari Aplikasi SISUPER

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada triwulan III tahun 2023 berhasil meraih kategori **"BERSIH DARI KORUPSI"** dengan nilai indeks sebesar **3,94 / 98,45** berdasarkan nilai indeks Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh dari perhitungan dan analisis data survei serta perhitungan yang didapatkan dari aplikasi SISUPER.



PENGADILAN TINGGI JAKARTA
Jalan Let. Jend. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
<https://www.pt-jakarta.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI Periode 1 Juli 2023 sampai 30 September 2023



Jumlah	58 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 46 PEREMPUAN : 12
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 0 SMP : 0 S1 : 48 SMU : 3 S2 : 7 Diploma 1 : 0 S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 5 SWASTA : 28 TNW : 1 WIRAUSAHA : 3 POLRI : 0 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 22

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pernah mengetahui ada praktik percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? 3,897
2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ? 3,914
3. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktik IKKN di Pengadilan ? 3,914

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

2 Oktober 2023
Ketua Pengadilan Tinggi

B. Publikasi Hasil Survei

Triwulan III tahun 2023 oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dilakukan melalui pemasangan poster pada ruang tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan infografis pada media sosial Pengadilan DKI Jakarta serta pada website PT DKI Jakarta di alamat <https://pt-jakarta.go.id/publik/laporan-publik/laporan-spak/3840-laporan-spak-triwulan-iii-tahun-2023.html>

C. Data Responden

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada triwulan III tahun 2023 diikuti oleh 58 responden yang seluruhnya merupakan pengguna layanan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Adapun data dari para responden SPAK di triwulan III tahun 2023 adalah sebagai berikut :

DATA RESPONDEN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN III TAHUN 2023

No	Nama/Kode Responden	No. Hp	Pelayanan	Waktu Rekam
1	RAHMAD	081282321847	Layanan Hukum / Informasi	Selasa, 26 September 2023 08:35:57 WIB
2	Drs. Herly Cahyono	1348181201055	Layanan Hukum / Informasi	Selasa, 26 September 2023 08:17:15 WIB
3	Hanjah Simbolon	081381886337	Layanan Perdata	Selasa, 26 September 2023 08:13:13 WIB
4	Denisa Hafifah Bilkis, S.H. M.Kn.	081385159937	Layanan Perdata	Jumat, 22 September 2023 09:18:40 WIB
5	ELVAN GOMES	08121197484	Layanan e-Court	Jumat, 22 September 2023 09:14:10 WIB
6	ALIAN SAFRI	02165301034	Layanan e-Court	Jumat, 22 September 2023 09:10:17 WIB
7	ALIAN SAFRI	02165301034	Layanan e-Court	Kamis, 21 September 2023 13:25:43 WIB
8	Agung Ahmad	081321212110	Layanan Administrasi Umum	Kamis, 14 September 2023 09:08:17 WIB
9	Muhammad Sholeh	082230201073	Layanan Tipikor	Kamis, 14 September 2023 08:36:22 WIB
10	Suhendra	082178733388	Layanan Administrasi Umum	Kamis, 14 September 2023 08:12:19 WIB
11	Herman	082110445799	Layanan Perdata	Kamis, 14 September 2023 08:02:15 WIB
12	Agus	087841664405	Layanan Hukum / Informasi	Selasa, 12 September 2023 14:04:32 WIB
13	Dessy Susanti	081230956688	Layanan Pidana	Selasa, 12 September 2023 09:28:18 WIB
14	Asep Solehudin	081387190339	Layanan Administrasi Umum	Selasa, 12 September 2023 09:05:01 WIB
15	Reza	081905675675	Layanan Perdata	Selasa, 12 September 2023 08:40:07 WIB
16	Sentot	0025845522	Layanan Administrasi Umum	Selasa, 12 September 2023 08:33:25 WIB
17	Barja	081388193901	Layanan e-Court	Kamis, 7 September 2023 10:39:39 WIB
18	WARNO	081218959692	Layanan Hukum / Informasi	Kamis, 7 September 2023 10:00:12 WIB
19	Ganda	082298470644	Layanan Perdata	Kamis, 7 September 2023 09:45:54 WIB
20	Joee	081310100723	Layanan Perdata	Rabu, 6 September 2023 09:10:01 WIB
21	Emma	081310224485	Layanan Perdata	Selasa, 5 September 2023 13:31:36 WIB
22	YOLANDA	088293970233	Layanan Hukum / Informasi	Jumat, 1 September 2023 09:04:11 WIB
23	Ferdy Ridwan	08568797707	Layanan Perdata	Jumat, 1 September 2023 08:59:09 WIB
24	Vionita	081222793408	Layanan Perdata	Jumat, 1 September 2023 08:52:19 WIB

25	Irren Patricia	088293970233	Layanan Hukum / Informasi	Rabu, 30 Agustus 2023 14:06:38 WIB
26	Arif	087748839708	Layanan Perdata	Rabu, 30 Agustus 2023 13:57:16 WIB
27	Nandito Suharyono	08861709985	Layanan Hukum / Informasi	Selasa, 15 Agustus 2023 09:49:51 WIB
28	Arnold	082269195450	Layanan Perdata	Selasa, 15 Agustus 2023 09:41:49 WIB
29	Liana	085161438202	Layanan Perdata	Selasa, 15 Agustus 2023 09:37:22 WIB
30	Yosep	081213431005	Layanan Perdata	Jumat, 11 Agustus 2023 13:49:59 WIB
31	Emma	081310224485	Layanan Perdata	Jumat, 11 Agustus 2023 13:44:50 WIB
32	Kasman ELY	081241284110	Layanan Administrasi Umum	Jumat, 11 Agustus 2023 13:40:02 WIB
33	Adji	085939443525	Layanan Perdata	Rabu, 9 Agustus 2023 13:34:19 WIB
34	Anwar Mukti	089513147465	Layanan Administrasi Umum	Kamis, 3 Agustus 2023 10:43:43 WIB
35	Adi Suprayitno	082226273282	Layanan Hukum / Informasi	Rabu, 2 Agustus 2023 15:26:04 WIB
36	Eko	082299456651	Layanan Perdata	Rabu, 2 Agustus 2023 15:22:52 WIB
37	Noviriska	081283895159	Layanan Tipikor	Selasa, 1 Agustus 2023 14:03:57 WIB
38	Andini Eka Kayla	085777860214	Layanan Administrasi Umum	Selasa, 1 Agustus 2023 13:59:44 WIB
39	Reski	08161887050	Layanan Perdata	Selasa, 25 Juli 2023 13:41:42 WIB
40	Alex	082281400978	Layanan Hukum / Informasi	Selasa, 25 Juli 2023 13:36:20 WIB
41	Afdal	081381306077	Layanan Hukum / Informasi	Senin, 24 Juli 2023 15:13:54 WIB
42	Marthen Indra Mangiwa, SH	085250295300	Layanan Perdata	Senin, 24 Juli 2023 10:35:33 WIB
43	Arief Budiman, S.Sos	085782296321	Layanan Administrasi Umum	Senin, 24 Juli 2023 09:47:28 WIB
44	Hotman	08128182888	Layanan Pidana	Senin, 24 Juli 2023 08:33:17 WIB
45	Manahara	08515601598	Layanan Perdata	Senin, 24 Juli 2023 08:26:24 WIB
46	HARYONO	082181854907	Layanan Pidana	Jumat, 21 Juli 2023 13:43:54 WIB
47	Indra	085250295300	Layanan Perdata	Senin, 17 Juli 2023 13:08:29 WIB
48	Samuel	081322509716	Layanan Perdata	Senin, 17 Juli 2023 09:47:39 WIB
49	Gidion	08121091000	Layanan Perdata	Kamis, 13 Juli 2023 10:17:08 WIB
50	Anca	081324520180	Layanan Administrasi Umum	Rabu, 12 Juli 2023 09:00:31 WIB
51	Hosea	085395947860	Layanan Perdata	Rabu, 12 Juli 2023 08:43:49 WIB
52	Herman	082110445799	Layanan Perdata	Rabu, 12 Juli 2023 08:36:42 WIB
53	HARIADI	081211096337	Layanan Perdata	Rabu, 12 Juli 2023 08:29:14 WIB
54	Adri	085794510735	Layanan Perdata	Rabu, 12 Juli 2023 08:24:41 WIB

55	Almeira Nabila Safira	085717420084	Layanan Administrasi Umum	Rabu, 5 Juli 2023 13:49:38 WIB
56	Syfrizal	081280004886	Layanan Perdata	Senin, 3 Juli 2023 16:12:34 WIB
57	Zulfikri	082110866195	Layanan Tipikor	Senin, 3 Juli 2023 16:02:53 WIB
58	Harian	081315098128	Layanan Perdata	Senin, 3 Juli 2023 15:58:33 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Tinggi DKI Jakarta memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,94 atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,914
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,948
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,931
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,948
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,966
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,966
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,966
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,897
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,914
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,931

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2023 pada triwulan III tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,90 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Percaloan, Manipulasi Peraturan dan Perbuatan Curang (Praktek KKN) memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN

MENU PENGISIAN DATA RESPONDEN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA APLIKASI SISUPER

Not secure | survey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_pk



APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari hasil yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan

1 Data Responden

2 Layanan

3 Form Kuesioner

Layanan

4 Kesen & pesan

Isian form kuesioner SPAK

5 Kesen & pesan

Menyampaikan pesan dan pesan Anda

Data Responden SPAK

Nama	<input type="text" value="Brahm Prasasti atau Bapak Depi"/>	
Umur / Jenis Kelamin	<input type="text" value="25 tahun"/>	Pilih Jenis Kelamin
Nomor HP	<input type="text" value="+62 812111222"/>	
Domisili	Pilih Wilayah	
Pendidikan	Pilih Pendidikan	
Pekerjaan	Pilih Pekerjaan	

Kembali

Setorannya

MENU PENGISIAN LAYANAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK RESPONDEN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI



APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari kasidat yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan

Data Responden
Nama serta detail responden

Layanan
Layanan

Form Kuesioner
Isian form kuesioner SPAK

Kesan & pesan
Maklumi isi kesan dan pesan Anda

Layanan yang Anda dapatkan

Jenis Layanan *

Pernah Menerima Layanan Ini Sebelumnya ? *

Kembali

Selanjut



MENU SARAN DAN MASUKAN UNTUK RESPONDEN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA APLIKASI SISUPER



APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form masukan untuk survey bagi pengguna layanan / pemakai keadilan yang mengacu pada zona integrasi dalam pelayanan Pengadilan.

Data Responden
Nama serta data responden

Layanan
Layanan

Form Kuisioner
Isian form kuisioner SPAK

Kesan & pesan
Masukan ke Kesan dan pesan Anda

Mohon untuk mengisi kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami di sini.

Terima kasih karena telah mengisi form Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta.
Klik Kotak dibawah 'Saya bukan robot' sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.

Saya bukan robot

Simpan Data

Kembali

Setelings